



# Laporan Percepatan Pembangunan Papua



# PERIODE MARET 2025

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Maret 2025 telah dilaksanakan dengan baik oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya maupun Anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Pada bulan Maret 2025, arah dan fokus pelaksanaan kegiatan SHEK mulai menyesuaikan dengan dinamika baru, seiring dengan dimulainya masa jabatan Kepala Daerah yang baru. Kegiatan-kegiatan pada bulan ini mengarah pada upaya penguatan sinergitas dan koordinasi lintas sektor, baik dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder terkait lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

# Kegiatan-Kegiatan Strategis





# KEGIATAN STRATEGIS 1

Pada tanggal **05 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

## Hasil kegiatan :

1. Pihak pemerintah kota Sorong telah melakukan fungsi mediator dengan melaksanakan pendaftaran penyimpangan ini ke PPHI Manokwari tanggal 6 Maret 2007.
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah berproses di pengadilan negeri Manokwari.
3. Pihak pertamina tetap memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah ini, jika tidak menerima keputusan ini, dipersilahkan melakukan tuntutan melalui jalur hukum peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Karena alasan biaya, Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua (DE. Yusitnus Waa) sebagai pihak penggugat tidak mampu untuk melakukan upaya tuntutan lanjutan melalui jalur hukum.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Upaya penyelesaian perselisihan antara Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua dengan PT Pertamina telah berlangsung lama sejak tahun 2005.
2. Perlu penelusuran kembali terkait perselisihan Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua dengan PT Pertamina. Pihak terkait yang berperan penting adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong.
3. Perlu dilakukan audiensi bersama dinas tenaga kerja kota sorong, dengan fokus topik audiensi kepastian.





# KEGIATAN STRATEGIS 2



Pada tanggal **05 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Diskusi Bersama Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 181/PVT** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

## Hasil kegiatan :

1. Petunjuk teknis perlu disiapkan untuk mengawal proses penyiapan pelaksanaan Program MBG.
2. Tim Satgas Provinsi terkait pelaksanaan MBG perlu disiapkan untuk optimalisasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan MBG.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. BP3OKP perlu mendorong agar segera dihasilkannya petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG
2. BP3OKP perlu mendorong pembentukan Tim Satgas tingkat Provinsi untuk melaksanakan optimalisasi, koordinasi, dan sinkronisasi.



# KEGIATAN STRATEGIS 3

Pada tanggal **06 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab. Sorong Selatan dan Kunjungan Kerja ke Lokus Program SSH di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan.**

## Hasil kegiatan :

1. SSH telah didorong dari 1 SD menjadi 3 Sekolah.
2. Pengelolaan SSH membutuhkan pihak ke-3 dalam rangka percepatan dan aktivitas.
3. Pelaksanaan SSH Perlu dievaluasi dengan mendengarkan Tim ahli dan Pengelola untuk menyampaikan hasil dan desain pengembangan SSH di Kabupaten Sorong Selatan.
4. Selain SSH, Program percepatan lain perlu diperhatikan, mulai dari melaksanakan tuis SHEK untuk mengevaluasi RKPD tahun 2025 sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrebang Kab/kota dan Provinsi Papua Barat Daya, mengingat pergerakan meningkatnya angka RLS dan HLS membutuhkan range waktu yang sangat anjang yakni 5-7 tahun.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perencanaan pelaksanaan SSH tahun 2025 perlu diawali dengan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya proses di sekolah tetapi juga bersama OPD Teknis.
2. Perlunya melaksanakan tuis SHEK untuk mengevaluasi RKPD tahun 2025 sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrebang Kab Sorong Selatan, mengingat pergerakan meningkatnya angka RLS dan HLS membutuhkan range waktu yang sangat anjang yakni 5-7 tahun.







# KEGIATAN STRATEGIS 5



Pada tanggal **07 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan di Kabupaten Sorong Selatan**.

## Hasil kegiatan :

1. Belum ada pembayaran sisa kegiatan pembangunan RS Tipe D Pratama Inanwatan.
2. Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan belum sepenuhnya mengacu pada RIPPP.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Kepala Dinas Kesehatan hendaknya berkomunikasi dengan pihak Badan Keuangan Daerah untuk menyelesaikan sisa pembayaran RS Tipe D Pratama Inanwatan.
2. Organisasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan mengacu pada RIPPP dan RAPPP.



# KEGIATAN STRATEGIS 6

Pada tanggal **12 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Pertemuan Bersama Gubernur Provinsi Papua Barat Daya** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

## Hasil kegiatan :

1. BP3OKP menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan.
2. BP3OKP menyampaikan isu-isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya.
3. BP3OKP menerima masukan-masukan dari Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
4. Komitmen Gubernur Provinsi Papua Barat Daya telah sejalan dengan BP3OKP PBD dalam hal Misi Papua Cerdas : mendukung terlaksanakannya sekolah dan kesehatan gratis di PBD.
5. BP3OKP memfollowup pembentukan satgas program MBG.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu adanya kolaborasi dan komitmen bersama dalam melaksanakan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.





# KEGIATAN STRATEGIS 7



Pada tanggal **10 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama SKK Migas Wilayah Papua** di **Kantor Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku**.

#### Hasil kegiatan :

1. Perusahaan (Petrogas, K3S dst) sudah melakukan program CSR dalam bidang ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan kepada Masyarakat lokal.
2. Belum ada regulasi dan kegiatan pemetaan terhadap tanah adat sehingga terjadi saling klaim hak ulayat yang mengganggu iklim investasi (terjadi pemalangan dll).
3. Tidak terdapat sosialisasi secara menyeluruh bagi masyarakat setempat terkait manfaat dari beroperasinya perusahaan terhadap mereka (manfaat CSR).
4. Belum tersedianya sdm warga lokal (ring 1) yang sesuai kualifikasi perusahaan agar bisa diterima kerja dalam perusahaan tersebut. Dalam proses eksplorasi pihak perusahaan sudah berusaha secara maksimal agar dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal (OAP).

#### Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu mendorong Lembaga pelatihan (Balai Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas Sorong) agar standarnya sesuai dengan standar yang sudah diakui perusahaan nasional maupun internasional.



# KEGIATAN STRATEGIS 8

Pada tanggal **13 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama Keuskupan Manokwari-Sorong** di **Sekretariat Keuskupan Manokwari-Sorong**.

## Hasil kegiatan :

1. Keuskupan Manokwari-Sorong menyampaikan rasa syukurnya, karena keluarnya Permendikdasmen No 1 Tahun 2025 yang telah memberikan kesempatan kepada guru-guru P3K dan ASN untuk mengajar di Sekolah Swasta.
2. Permasalahan kesehatan seperti HIV/AIDS dan fertilitas menjadi perhatian bersama.
3. Perlu kolaborasi dan keterlibatan dari Keuskupan Manokwari-Sorong untuk terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Program MBG diterima oleh Keuskupan Manokwari-Sorong/YPPK dan akan melakukan pendaftaran untuk menjadi bagian dari pengelola dapur.





# KEGIATAN STRATEGIS 9

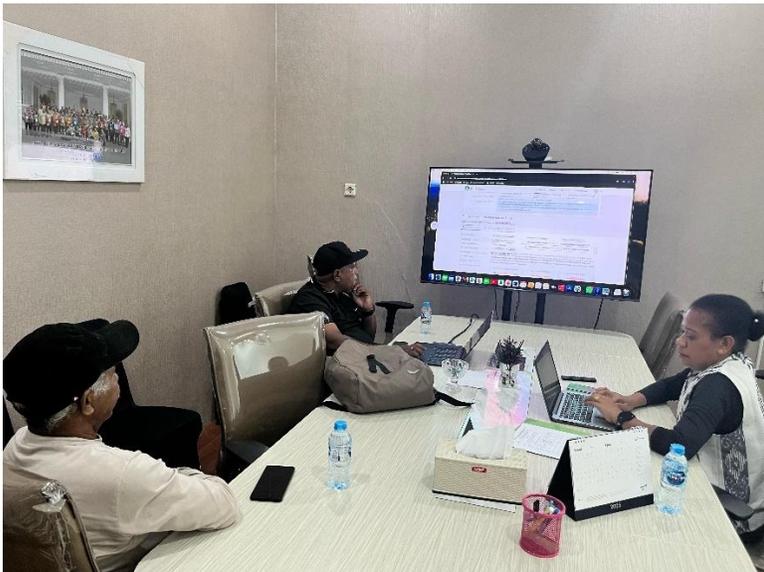
Pada tanggal **14 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **FGD Review RKA Tahun 2025 dan Hasil Rapot Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

## Hasil kegiatan :

1. Bahwa SPM Pendidikan di Sorong Selatan meningkat lebih dari 10% dari 45,78 menjadi 58,15% pada tahun 2025.
2. Literasi dan Numerasi secara keseluruhan SPMnya sudah baik, walaupun beberapa sekolah swasta masih Merah, terutama untuk Sekolah dibawah Kemenag.
3. Evaluasi Rapot Pendidikan oleh disdik sorsel telah dijadikan sebagai dasar acuan perencanaan program pada tahun penganggaran berikutnya.
4. Sebagian data pada rapor masih berwarna Abu-abu (Belum terupdate/belum diisi oleh sekolah dan atau pengelola).

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Tugas pengawasan oleh pengawas dan OPD Teknis sebaiknya dilakukan juga hingga memastikan semua data yang dibutuhkan pada rapor, terisi dengan BENAR.
2. Analisis data keberhasilan dan mutu pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan baiknya didapatkan dari BPMP Papua Barat.
3. Penyiapan Data menurut satuan pendidikan sesuai Kewenangannya perlu dilakukan (Data Peserta Didik, Rombel, fasilitas pendukung pembelajaran lainnya) sesuai amanat PP 106 tahun 2023.
4. Baiknya Publik juga dapat mengakses Rapor Pendidikan sebagai bagian dari transparansi data sekaligus ikut bertanggungjawab secara bersama membenahi kualitas pendidikan.





# KEGIATAN STRATEGIS 10



Pada tanggal **17 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya ikut serta dalam kegiatan **Pembagian Makan Perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sorong**, kegiatan ini dilaksanakan di **SD Negeri 15 Kompleks Melati Raya Kota Sorong**.

#### Hasil kegiatan :

1. Kegiatan berjalan dengan baik.
2. Berdasarkan evaluasi, per 17 Maret 2025, di wilayah Kota Sorong terdapat kekurangan SPPG sebanyak 19.

#### Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu koordinasi dengan SPPI terkait titik pengusulan SPPG baru di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.



# KEGIATAN STRATEGIS 11

Pada tanggal **17 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan **Rapat Koordinasi Program Pendidikan Gratis di Provinsi Papua Barat Daya**, yang dilaksanakan di **Hotel Vega Kota Sorong**.

## Hasil kegiatan :

1. Bahwa beberapa Kab/Kota telah berkomitmen melaksanakan pendidikan Gratis, melalui tambahan Biaya Operasional berupa BOP (BOS-DA). Pada Dasarnya Kadis Pendidikan Kabupaten/Kota setuju dilaksanakannya program Pendidikan Gratis oleh Pemprov PBD.
2. Model Pendidikan Gratis di Papua Barat Daya dapat dilakukan sebagai Program prioritas Strategis Bersama (sesuai amanat PMK 33 tahun 2024) mengingat Bupati/Walikota terpilih juga mencangkan Program Sekolah Gratis sebagai Program Proioritas di daerahnya.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Melalui Dinas Pendidikan Provinsi PBD, perlu dibentuk tim perumus untuk :

1. Mempersiapkan Juknis hingga naskah Akademik Dasar Hukum Program Tersebut (Pergub, Perda, dst).
2. Menyiapkan Konsep/Desain Sekolah Gratsi sebagai PPSB antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot di PBD.
3. Menyiapkan data secara detail terkait factor penyebab Putus Sekolah, sumber-sumber anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang sekolah Grastis selain APBD.





# KEGIATAN STRATEGIS 12

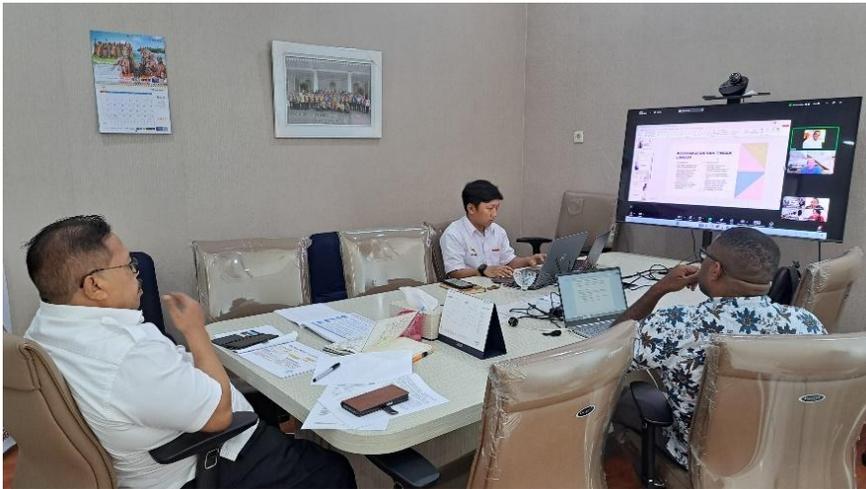
Pada tanggal **17 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan **Pertemuan Kerjasama BP3OKP Papua dan Papua Barat Daya Bersama AIP SKALA** secara daring di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

## Hasil kegiatan :

1. BPP akan didukung oleh SKALA mulai bulan Juli.
2. Instrumen Monev, perlu disesuaikan dengan kebutuhan tugas BPP Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran.
3. Evaluasi Kinerja Otsus setiap daerah ditampilkan dalam ranking secara kuantitatif.

## Rekomendasi/Rencana Tindakanjutt :

1. Perlu penjelasan tugas BPP dalam melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pemda didalam Bimtek Eksekutif.
2. Format Instrument Monev akan disepakati bersama.
3. Pergub pengelolaan TKD dan Forum Binwas internal Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat Daya akan dirancang untuk mendukung tugas BPP.





# KEGIATAN STRATEGIS 13

Pada tanggal **18-20 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya ikut serta dalam kegiatan **Training MRP Provinsi Papua Barat Daya** yang diselenggarakan oleh GiZ dan KPK di **Hotel Aston Kota Sorong**.

## Hasil kegiatan :

1. Kegiatan berjalan dengan baik.
2. BP3OKP mendorong agar GiZ berpartisipasi dalam Bimtek Eksekutif di masa yang akan datang.
3. BP3OKP menyambut baik niat MRP PBD yang melakukan kegiatan training pencegahan Korupsi ini.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

BP3OKP PBD akan membantu untuk mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh MRP PBD agar dapat terselesaikan.





# KEGIATAN STRATEGIS 14

Pada tanggal **18 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Pertemuan Bersama Kepala BIN Provinsi Papua Barat Daya** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.



## Hasil kegiatan :

1. BP3OKP menyampaikan pengenalan kelembagaan.
2. BP3OKP menyampaikan kegiatan-kegiatan strategis yang telah dilaksanakan.
3. BP3OKP menyampaikan isu-isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya.
4. Kepala BIN menyambut baik sinergitas yang dibangun antar BP3OKP dan BIN.
5. Kepala BIN siap untuk berkolaborasi dengan BP3OKP.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

BP3OKP dan BIN akan berkolaborasi.



# KEGIATAN STRATEGIS 15

Pada tanggal **21 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong** di **Kantor BPJS Kesehatan Kota Sorong**.

## Hasil kegiatan :

1. Kekosongan layanan Spesialistik anak di RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan belum stabilnya pemenuhan SDM Kesehatan di Papua Barat Daya. Perlu diambil Langkah-langkah untuk mengantisipasi kekosongan layanan bidang Kesehatan terutama di wilayah yang telah ada layanan sebelumnya.
2. Mobile Health Care merupakan salah satu program dari dua program besar bidang Kesehatan dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua. Hingga saat ini belum teridentifikasi kebutuhan daerah terhadap model transportasi yang akan dipersiapkan sesuai dengan kondisi geografis serta topografi wilayah yang menjadi sasaran program.
3. Pendataan Orang Asli Papua merupakan salah satu baseline data yang dapat bermanfaat untuk menjadi data awal bagi setiap perencanaan Pembangunan yang penganggarannya bersumber dari dana otonomi khusus maupun sumber dana lainnya yang terkait dalam Pembangunan di Papua.
4. Terkait program Jaminan Kesehatan nasional, hal tersebut merupakan fokus strategi yang diamanatkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sehingga menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui program Pembangunan yang berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah memastikan bahwa setiap warga Masyarakat terutama Orang Asli Papua memperoleh jaminan Kesehatan secara paripurna.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu disusun regulasi terkait pengadaan SDM Kesehatan di wilayah Papua, menyangkut tata cara pengadaan SDM maupun pembiayaan yang tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah sehingga menghindarkan terjadinya pemilihan daerah layanan oleh SDM berdasarkan plafon pendapatan.
2. Daerah sasaran program Mobile Health Care perlu mengidentifikasi kebutuhan daerah disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta plafon anggaran yang ada serta mencari peluang kolaborasi dengan stakeholder lain yang memiliki kepentingan atau program yang serupa.
3. Perlu dilakukan kolaborasi yang strategis terkait pendataan Orang Asli Papua dengan salah satu outputnya adalah menghasilkan data jumlah Orang Asli Papua yang belum memiliki Jaminan Kesehatan nasional.





# KEGIATAN STRATEGIS 16



Pada tanggal **21 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan **Rapat Koordinasi Data OAP Terpilah** di Ruang Rapat Sekretariat MRP PBD.

## Hasil kegiatan :

1. Kegiatan berjalan dengan baik.
2. Seluruh stakeholder bersepakat dan setuju untuk mengawal bersama Pendataan OAP Terpilah dan akan dibentuk Sekretaris Bersama (Sekber) serta akan berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.



# KEGIATAN STRATEGIS 17



Pada tanggal **22 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan **Mimbar Aspirasi Santai (MAS) Papua Bicara Makan Bergizi Gratis (MBG)** di **Belagri Hotel And Restaurant Sorong**.

## Hasil kegiatan :

BP3OKP menyampaikan terkait progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus dengan peran-peran kolaborasi yang dapat diambil oleh seluruh stakeholder, dan masyarakat guna meningkatkan produktivitas dan keterlibatan dalam pelaksanaan program MBG tersebut.



# KEGIATAN STRATEGIS 18

Pada tanggal **24 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Rapat Koordinasi Program SSH dan MoU** di Ruang Rapat Rektor Universitas Papua.

## Hasil kegiatan :

1. UNIPA dan BP3OKP telah menandatangani MoU dengan bidang kerja Tridarma Perguruan Tinggi sebagai Mitra Strategis pelaksanaan SHEK Percepatan Pembangunan di Papua Barat Daya.
2. Ada beberapa rekomendasi yang menjadi catatan untuk didorong oleh BP3OKP PBD :
  - a. Mendorong diaktifkan kembali Kegiatan Akademik AKNESS di Kabupaten Sorong Selatan.
  - b. Juknis MBG ; Juknis lokal perlu disiapkan terutama di dorong untuk pangan Lokal. Perlu duduk Bersama untuk Petunjuk Teknis MBG.
  - c. Stuckholder Migas: Unipa telah bersurat ke Kementerian ESDM, agar semua kajian terhadap OAP yang berdampak, harusnya diserahkan kepada patner PT lokal. Selama ini hanya UI, UGM, UPN, IPB, ITP ( Mitra lokal jangan lagi jadi penonton).
  - d. Program dan kegiatan secara rinci dapat disampaikan melalui dokumen lainnya secara terinci melalui PKS.
  - e. Pelaksanaan Implementasi Permendikbud 44 tahun 2023 agar segera diterbitkan Juknis dan petunjuk lainnya.

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari agenda SSH :

- a. Rekonsialisasi Tim perlu dilakukan dan menginisiasi dibentuknya Unit Inovasi Pendidikan Papua.
- b. Model yang telah dikembangkan di Sorsel wajib diberi pembobotan agar menjadi relevan dengan berbagai karakteristik wilayah sesuai Lokus .
- c. HAKI dan juga Perda SSH di Sorsel perlu didiskusikan lebih lanjut.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Peningkatan Kapasitas Pokja secara detail perlu diidentifikasi lebih detail sehingga Unipa dapat menyiapkannya.
2. Segala bentuk kegiatan Kerja Sama secara spesifik akan dibuat dalam PKS, sumber dana bisa berasal dari Kanwil/Sekretariat, maupun Pemprov/Pemkab/kota.
3. Unipa sebagai LPTK siap melaksanakan implementasi Permendikbud 44 tahun 2023 tentang percepatan tenaga Guru PAUD/TK dan SD, sehingga perlu koordinasi dengan Kemendikdasmen RI.
4. Tim SSH di Unipa perlu direkonsiliasi, Model SSH yang digunakan adalah yang dikembangkan di Sorsel, perlu dilakukan pembobotan sesuai dengan karakteristik lokus.
5. Perlu inisiasi pertemuan Unipa dan Pemkab Sorsel.
6. Mendorong Sorsel sebagai Kab Pilot Project SSH di PBD, Perda SSH. tetapi juga status dan keberlanjutan AKNESS.





# KEGIATAN STRATEGIS 19

Pada tanggal **25 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Rapat Koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat** di **Kanwil DJPb Papua Barat**.

## Hasil kegiatan :

1. Kerjasama yang lebih intens perlu dibangun antara mitra strategis, baik itu UNIPA maupun Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi.
2. Untuk Dana RED++ perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Prov PBD, sedangkan Dana Sawit menunggu informasi dan sosialisasi.
3. Kanwil DJPb telah menyiapkan aplikasi sederhana yang menunjang Tugas dan Fungsi SHEK BP3OKP.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu tindaklanjut penginputan data program sesuai jenis TKD untuk selanjutnya dapat digunakan oleh BP3OKP Prov Papua Barat dan Papua Barat Daya maupun seluruh BP3OKP di Tanah Papua.





# KEGIATAN STRATEGIS 20

Pada tanggal **26 Maret 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat** di **Kantor BPMP, Manokwari**.

## Hasil kegiatan :

1. Sesuai Tusnya BPMP merupakan lembaga yang mengontrol mutu dan kulaitas pendidikan termasuk di Papua Barat Daya.
2. Sejauh ini kendala terhadap Hasil Evaluasi Rapot dan BAN sering tidak dihiraukan oleh OPD teknis dalam perencanaan program.
3. Tiap Kab/kota telah memiliki Wali Wilayahnya, sehingga pendampingan dalam rangka pengisian rapot dan hasil evaluasi mutu.
4. Dalam melaksanakan Tusnya, BPMP hanya mengelola APBN, berharap dapat juga mengelola Dana OTSU untuk menjaga kualitas mutu pendidikan, terutama sekolah Yayasan.
5. BPMP berharap ada kerjasama dan sinergitas yang inten dengan BP3OKP dalam rangka meningkatkan kulitas mutu pendidikan di Papua Barat Daya.
6. BPMP emyediakan data kualitas mutu, Dapodik dan juga Narasumber, Silahkan membangun Sinergi jika dibutuhkan.

## Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu inisiasi kerjasama secara formal agar BP3OKP dalam melaksanakan fungsi SHEK nya lebih leluasa, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas mutu pendidikan di Papua Barat Daya. Mutu Pendidikan ini sejalan dengan salah satu Program Strategi Pembangunan Papua adalah Penginkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan sesuai amanat Perpres 12 tahun 2025.
2. Perlunya Keterlibatan BPMP bersama Dinas Pendidikan Provinasi PBD dalam mendesain master plan pembangunan pendidikan di Papua Barat Daya.
3. Diperlukan inisiasi pendirian BPMP di Papua Barat Daya.



# Capaian





# CAPAIAN (1)

Secara umum, capaian Maret 2025 tidak hanya dilihat dari sisi output fisik atau administratif, namun juga dari keberhasilan membangun dasar kemitraan, komunikasi, sinergitas, konstruktif dan kerjasama antara berbagai unsur. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya sekaligus memastikan implementasi visi-misi Kepala Daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Beberapa capaian bulan **Maret 2025** antara lain :

## Misi BP3OKP PBD

BP3OKP PBD telah bersinergi dan berkolaborasi dengan baik bersama Pemerintah Pusat K/L, Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kab/Kota maupun OPD dan Stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa diantaranya yaitu :

1. BP3OKP PBD telah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 181/PVT terkait update pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya.
2. BP3OKP PBD diundang dan ikut serta/berpartisipasi pada kegiatan Serah Terima Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, juga ikut serta dalam kegiatan Pisah Sambut Penjabat Kepala Daerah dan kegiatan pelantikan-pelantikan Kepala Daerah lainnya di Provinsi Papua Barat Daya.
3. BP3OKP PBD juga terlibat dalam kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya.
4. BP3OKP PBD juga telah melakukan koordinasi awal bersama Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
5. BP3OKP PBD telah melakukan audiensi bersama Keuskupan Manokwari-Sorong. Audiensi dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas, memperkenalkan kelembagaan BP3OKP, berdiskusi terkait isu-isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya, serta menyampaikan peran strategis yang dapat diambil oleh pihak Keuskupan Manokwari-Sorong dalam pelaksanaan program nasional MBG di Provinsi Papua Barat Daya.
6. BP3OKP PBD telah rapat bersama AIP SKALA guna membahas terkait mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi monev BP3OKP.
7. BP3OKP PBD juga ikut terlibat dalam kegiatan Training MRP Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan oleh GiZ dan KPK. BP3OKP PBD sebagai narasumber yang menyampaikan terkait arah kebijakan pembangunan berdasarkan RIRPP, RAPPP, evaluasi umum Otsus Papua, serta koordinasi dan pengarah pengawasan oleh BP3OKP.
8. BP3OKP PBD telah berkoordinasi dengan Kepala BIN Provinsi Papua Barat Daya terkait isu-isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya.
9. BP3OKP PBD juga terlibat dalam Rapat Koordinasi Data OAP Terpilah yang dilaksanakan oleh MRP PBD dengan bekerja sama dengan SKALA.
10. BP3OKP PBD melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD).
11. BP3OKP PBD melaksanakan rapat bersama Sekretaris Bappeda Kota Sorong guna persiapan pelaksanaan Musrenbang Otsus Kota Sorong Tahun 2025.
12. BP3OKP PBD juga ikut serta dalam undangan kegiatan Silaturahmi Perayaan Idul Fitri 1446H/2025 M yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.



# CAPAIAN (2)

## Misi Papua Sehat

1. Sebagai tindak lanjut kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dirjen SDM Kemenkes RI yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 lalu, BP3OKP PBD telah melaksanakan kunjungan kerja ke RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan untuk menyampaikan hasil koordinasi dan konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya, dalam rangka mengatasi permasalahan kekosongan pelayanan dokter di rumah sakit.
2. Pada tanggal 7 Maret 2025, BP3OKP PBD juga melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Sorong Selatan terkait dokumen perencanaan (RKA) tahun 2025.
3. Pada tanggal 19 Maret 2025, BP3OKP PBD melakukan kunjungan kerja di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Siloam serta Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.
4. BP3OKP PBD juga melaksanakan audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong guna berkoordinasi terkait pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

## Misi Papua Cerdas

1. Pada tanggal 6 Maret 2025, BP3OKP PBD melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab. Sorong Selatan dan Kunjungan Kerja ke Lokus Program SSH. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait dokumen perencanaan (RKA) tahun 2025 milik Dinas Pendidikan Kab. Sorong Selatan dan monev pelaksanaan program SSH di Kab. Sorong Selatan.
2. BP3OKP PBD ikut serta dalam kegiatan undangan Ibadah Syukur HUT ke-63 tahun YPK di Tanah Papua. Dalam mengikuti kegiatan ini, tak hanya untuk membangun sinergitas dan kerja sama, namun, juga menyampaikan terkait aturan pendidikan yang telah terbit yakni Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, yang mana dapat digunakan dan diimplementasikan oleh YPK, serta berkoordinasi terkait isu pendidikan lainnya.
3. BP3OKP PBD juga melaksanakan kegiatan FGD Review RKA Tahun 2025 dan Hasil Rapot Pendidikan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sorong Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan guna berkoordinasi terkait perencanaan-perencanaan program yang akan dilakukan serta evaluasi terhadap rapot pendidikan.
4. BP3OKP PBD juga terlibat dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Pendidikan Gratis Tingkat Provinsi Papua Barat Daya. BP3OKP PBD menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
5. Pada tanggal 24 Maret 2025, BP3OKP PBD bersama UNIPA melakukan penandatanganan MoU dan rapat koordinasi program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Selain itu, BP3OKP PBD juga melakukan koordinasi dengan BPMP Provinsi Papua Barat terkait evaluasi mutu pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.



# CAPAIAN (3)

## Misi Papua Produktif

1. Pada tanggal 5 Maret 2025, BP3OKP PBD menerima permohonan audiensi oleh Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua (LSKP) PBD. LSKP menyampaikan terkait dokumen-dokumen pendukung permasalahan penyimpangan hak normatif eks Pertamina yang sudah pernah disampaikan sebelumnya.
2. BP3OKP PBD juga melaksanakan audiensi dengan SKK Migas Wilayah Papua. Audiensi ini dilaksanakan untuk membangun sinergitas dan berkoordinasi terkait peluang kerja serta program challengers SKK Migas.
3. BP3OKP PBD terlibat dalam kegiatan Pembagian Makan Perdana MBG di Kota Sorong. Anggota BP3OKP PBD sebagai tokoh yang memberikan makanan kepada penerima manfaat yakni siswa/i SD Negeri 15.
4. BP3OKP PBD juga diminta menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Mimbar Aspirasi Santai (MAS) Papua Bicara Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pihak penyelenggara kegiatan yakni Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui uraian capaian di atas, dapat digali pembelajaran dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk **mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang**. **Capaian di bulan Maret 2025 ini juga merupakan refleksi dari upaya kolaboratif dan kerja keras yang terus dipupuk sejak awal pelaksanaan tugas BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya hingga saat ini.**

